

MENANGGULANGI KERUGIAN NEGARA AKIBAT KERUSAKAN ALAM KARENA PERTAMBANGAN OLEH KORPORASI

Andika Pramana^[1], Wandi Mulyana^[2], Risma Rosmiyanti^[3], Tiara Herianda^[4],
Universitas Syiah Kuala, Institut Pendidikan Indonesia Garut

Abstrak

Pertambangan adalah salah-satu asset penting bagi Negara yang mempunyai asset tersebut . asset akan memberikan pemasukan yang sangat besar untuk Negara jika dikelola dengan baik. pemerintah Indonesia sangat berhati-hati dalam mengelola asset ini karena menjadi sumber pemasukan bagi kas negara, realita dilapangan pemerintah hanya mendukung para korporasi-korporasi liberal dalam mengelola asset ini. Para pengelola liberal kebanyakan orang asing. Mereka cenderung mengambil untuk sebesar-besarnya dan meminimalisir modal yang dikeluarkan. Akibatnya kerusakan alam di Indonesia semakin parah dan akan menimbulkan polusi dan kolusi dimana-dimana. Pemerintah harus bertanggung jawab akan perizinan yang diberikan kepada korporasi yang tidak bertanggung jawab akan kerusakan alam Indonesia tanpa penanggulangan yang kurang baik.

Kata kunci : *pertambangan, korporasi, asset, pemerintah*

Abstract

Mining is one of the important assets for the country that owns these assets. assets will provide a very large income for the state if managed properly. The Indonesian government is very careful in managing these assets because they are a source of income for the state treasury, the reality on the ground that the government only supports liberal corporations in managing these assets. Liberal managers are mostly foreigners. They make decisions to maximize and minimize the capital spent. resulting in the destruction of nature in Indonesia is getting worse and will cause pollution and collusion everywhere. The government must be responsible for the permits granted to corporations that are not responsible for the destruction of Indonesia's nature without unfavorable countermeasures.

Keywords: mining, corporation, assets, government

I. Pendahuluan

Latar Belakang

Pertambangan sudah menjadi ciri kegiatan yang di abaikan oleh pemerintah. Sehingga menyebabkan bencana alam, rusaknya komposisi air, tanah udara hingga hancurnya bentang alam, sudah menjadi hal yang sangat biasa Karana kawasan pertambangan ini tidak mendapatkan perlakuan pemulihan yang layak.

Kegiatan pertambangan ini merusak kehidupan masyarakat yang hidup nya menggantungkan di kawasan pertambangan, juga menimbulkan penindakan hak rakyat atas tanah adat, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Menindak lanjuti hal ini seharusnya pemerintah segera melakukan upaya untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan pertambangan ini. Untuk itu penulis akan menelaah upaya yang dapat di lakukan pemerintah berkaitan dengan kerusakan alam karena pertambangan oleh korporasi

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana cara pemerintah dalam menanggulangi kerugian negara akibat kerusakan alam karena pertambangan oleh korporasi ?

II. Metode Penelitian

Teknik dan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu teknik diskusi,searching,dan juga studi literasi.metode searching ini penulis gunakan dalam bentuk mencari atau mengumpulkan data dan juga menambah wawasan penulis dengan menggunakan metode ini penulis banyak mendapatkan infomasi lebih lanjut dan ini sangat berguna dalam penelitian.

Sedangkan dalam bentuk diskusi penulis yang bersifat per-tim ini bersama-sama melakukan diskusi untuk saling berargumen sehingga banyak hal yang bisa disatukan,dan banyak solusi yang didapatkan,serta memudahkan dalam memperluas pengetahuan dalam memahami materi ini.

Terakhir metode penelitian yang digunakan ialah studi literasi/study litetatur. hal ini digunakan penulis dalam menelusuri referensi atau data dalam menguatkan argumen,hal ini digunakan juga dalam menyelesaikan permasalahan didalam tulisan tersebut dengan memerhatikan sumber-sumber yang dapat menjadi penunjang membantu dalam menyelesaikan persoalan.

III. Pembahasan

Aktivitas Pertambangan merupakan salah satu bentuk kerugian negara yang mengakibatkan kerusakan alam yang dilakukan oleh korporasi. Sudah banyak solusi yang dihadirkan oleh pemerintah dalam mengatasi hal tersebut, namun tetap saja masih banyak kita dapatkan kegiatan tersebut. Sinergi antara korporasi dan pemerintah harus dilakukan untuk mengurangi kerusakan alam yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan.

Berikut ini upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi dan mengatasi kerugian negara yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan :

- a. Melakukan pemberhanan aturan dengan mencabut kebijakan di bidang pertambangan yang dimana secara hierarki sudah bertentangan dengan konstitusi yaitu UUD 1945 dan nilai yang ada didalamnya.
- b. Pemerintah dalam hal membuat kebijakan harus teliti dan memikirkan resikonya. Jatuhnya investasi di bidang pertambangan pada masa pemerintahan Habibie malah membuat Indonesia memberikan kemudahan kepada investor baru di bidang pertambangan.
- c. Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang tinggal disekitar lokasi terjadinya aktivitas pertambangan. Hal itu dikarenakan banyak resiko yang timbul dari kegiatan pertambangan, bukan hanya lingkungan saja yang rusak, tetapi dapat mengakibatkan terancamnya nyawa masyarakat yang berada disekitar lokasi tersebut.
- d. Pemerintah juga segera menciptakan kebijakan baru di bidang pertambangan yang lebih memihak kepada rakyat. Penyediaan lahan adalah salah satu penyebab utama masalah yang timbul dalam kegiatan pertambangan di

Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena banyaknya aturan yang tumpang tindih mengenai hak atas tanah yang menjadi lokasi pertambangan. Hal itu pernah terjadi pada penduduk di Papua Barat yang dimana wilayahnya termasuk dalam klausul kontrak pertambangan PT. Freeport Indonesia.

- e. Pemerintah harus membuat standar mengenai pengelolaan lingkungan hidup dalam aktivitas yang diakibatkan oleh pertambangan. Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang memiliki resiko tinggi, padat teknologi dan padat modal. Resiko tersebut selain pada keselamatan kerja bagi para pekerja tambang, tetapi berdampak juga pada lingkungan hidup setelah aktivitas pertambangan tersebut dilakukan.

IV. Kesimpulan

Banyak pihak yang mesti bertanggung jawab akan kerusakan alam ini. Pemerintah harus mampu bersikap tegas kepada korporasi yang menguasai pertambangan untuk bisa menjaga keseimbangan alam Indonesia terjaga. Walapun kontribusi penghasilan pertambangan sekitar 1% - 3% untuk pendapatan kas Negara namun bukan berarti pemerintah meloanggarkan pihak-pihak yang sudah merusakan tanah air Indonesia. Korporasi harus bisa meminimalisir dampak negatif akibat eksploitasi pertambangan dan harus mampu mengedukasikan kepada semua pihak bahwasannya penjagaan kelestarian alam itu harus menjadi prioritas utama.

Dari sambaining sampai merauke, tanah air Indonesia jika tidak jaga sama penguasa sebagai pemangku kebijakan maka oleh siapa lagi. Pemerintah dengan kuasanya jangan terlalu memikirkan perutnya pribadi ataupun keluarganya tetapi juga harus mampu menghasilkan pengabdian untuk kepentingan rakyat Indonesia itu sendiri. Jangan sampai orang asing yang menikmati keuntungan hasil pertambangan, sedangkan pribumi hanya melihat kerusakan alam yang terjadi di Negaranya sendiri.

V. Daftar Pustaka

- Anonim, 2004, Tambang di Milenium Baru, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Jakarta.
- Hidayati, Nur, 2006, Sistem Perjanjian Pertambangan Skala Besar (Kontrak Karya) yang Tidak Adil, www.walhi.com, Jakarta.
- Khakim, Abdul, 2005, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saleng, Abrar, 2004, Hukum Pertambangan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.